

Analisis Pengaruh Pajak dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2020

Muhammad Fahrul Rozy, Harsono, Adi Suprayitno



Muhammad Fahrul Rozy¹, Harsono², Adi Suprayitno³; ¹, ²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang ³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Klojen, Kota Malang, 65146, Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-08-06

Received in revised form 2022-10-06

Accepted 2022-26-06

Kata kunci:

Pertumbuhan Ekonomi,
Pajak Daerah, Belanja
Daerah

Keywords:

Economic Growth, Local Tax,
Regiona Expenditure

How to cite item:

Muhammad Fahrul Rozy,
Harsono, Adi Suprayitno.
(2022). Analisis Pengaruh
Pajak dan Belanja Daerah
Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Kota Malang
Tahun 2010-2020.

*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 3(2).

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang diharapkan terus tumbuh dan menjadi penopang masyarakat agar sejahtera. Dalam hal ini, maka masyarakat dan pemerintah harus berkontribusi dalam mewujudkan harapan tersebut. Indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang diukur dari pemasukan pajak daerah dari wajib pajak maupun badan serta belanja daerah yang fungsinya adalah sebagai sumber pendanaan bagi kesejahteraan daerah. Berdasarkan urgensi tersebut, maka penelitian ini mengukur pengaruh pajak daerah dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2020. Metode penelitian menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis serta uji model regresi linear berganda dari data primer yang diolah. Hasilnya pada variabel pajak daerah dan belanja daerah terdapat pengaruh simultan atau bersama sama antara pajak daerah dan belanja daerah, meski begitu pengaruh positif sangat rendah pada belanja daerah serta berpengaruh negatif pajak daerah namun signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2020.

Economic growth in the Malang City is expected to continue to grow and support a prosperous society. So society and government must contribute in realizing these expectations. Indicators of the success of economic growth in Malang City are measured from local tax revenues from taxpayers and entities as well as regional expenditures whose function is as a source of funding for regional welfare in Malang City. This study measures the effect of local taxes and regional expenditures on economic growth in Malang City in 2010-2020. The research method uses classical assumption tests, hypothesis testing and multiple linear regression model tests from primary data that is processed. The result is that the regional Tax and Regional Expenditure Variables have a simultaneous or joint effect between regional expenditures, even though the positive influence is very low on Regional Expenditures and has a negative effect on regional taxes but is significant on economic growth in Malang City of 2010-2020

* Muhammad Fahrul Rozy, Harsono, Adi Suprayitno.

© 2022 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dampak kinerja sektor ekonomi dan mampu memberikan pendapatan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Wulandari & Kartika, 2021). Indikator yang digunakan adalah pendapatan asli daerah atau pajak daerah. Kedudukan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah jika realisasinya kurang dapat berdampak terhadap anggaran dan belanja daerah pada periode tertentu (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Dalam pelaksanaan belanja daerah, pemerintah harus adil dan merata terhadap seluruh lapisan masyarakat dan tidak berat sebelah pada sektor pelayanan publik. Dalam hal ini, kondisi pajak daerah dan belanja daerah mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek dan sektor di sebuah wilayah (Rizki et al., 2021).

Pajak daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Sunarto & Sunyoto, 2016). Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain adalah sebagai berikut: (i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (ii) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (iii) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Air Tanah (PAT); (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); (vii) Pajak Sarang Burung Walet; (viii) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (ix) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Safitri, 2021).

Kota Malang adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang terus meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya, maka Pemerintah Kota Malang berkewajiban mengelola pajak daerah sebagaimana tugas yang telah diemban. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas utama untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah khususnya di Kota Malang. Berdasarkan urgensi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hubungan antara Pajak Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang pada rentang tahun 2010-2020.

2. Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya kegiatan di dalam masyarakat yang berakibat kepada meningkatnya jumlah produksi barang maupun jasa yang mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam jumlah tertentu semakin banyak dan kemakmuran masyarakat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (Nirbita & Sartika, 2020).

Pajak daerah merupakan iuran yang dibebankan kepada perorangan ataupun suatu badan serta instansi yang berguna untuk menyejahterakan masyarakat dengan tidak menerima imbalan secara langsung setelah memenuhi kewajiban dalam pembayarannya. Peran pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dapat berkontribusi secara penuh bagi kemakmuran masyarakat. Pajak bersumber dari rakyat dan akhirnya kembali ke rakyat dengan pemerintah sebagai akomodasinya. Hal ini berarti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara, pengatur maupun pembuat kebijakan akan dana dari pajak daerah yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Belanja Daerah adalah suatu kewajiban daerah yang dibenarkan sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode dan anggaran tahunan yang bersangkutan dan berlaku sesuai (Palguno *et al.*, 2020). Belanja daerah terdiri dari dua jenis, yaitu: (i) belanja operasi, yaitu belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan; dan (ii) belanja modal, yaitu belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi serta jaringan, belanja aset tetap lain. Peran Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu berkontribusi untuk membangun atau mengalokasikan sesuai realisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD) yang akan dipergunakan sesuai dengan tujuannya untuk membangun daerah yang diharapkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejahtera (Saraswati & Ramantha, 2018).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Indikasi-indikasi yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis terlebih dahulu, dan sumber data yang didapatkan peneliti yaitu data sekunder. Teknik analisis data antara lain sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif Statistik

Metode analisa ini data dideskripsikan untuk menjelaskan persentase tingkat pertumbuhan ekonomi (variabel Y), peningkatan pajak daerah (variabel X1), dan peningkatan belanja daerah (variabel X2). Hubungan beberapa variabel tersebut dirumuskan oleh Nugroho (2014) sebagai berikut:

$$G = \frac{T_1 - T_{t-1}}{T_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- T_1 = Pajak Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi tahun sekarang
 T_{t-1} = Pajak Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi tahun sebelumnya

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik membuktikan terlebih dahulu layak atau tidaknya melakukan pengujian regresi pada penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pada uji normalitas diukur dari nilai signifikansi yang dikatakan berdistribusi normal pada nilai residu variabel independen yaitu harus lebih besar dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 maka nilai signifikansinya pada setiap variabel independen tidak berdistribusi normal dan data tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian regresi.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan sebagai perantara untuk mengetahui adanya tingkatan korelasi yang tinggi pada dua variabel dalam sebuah penelitian. Jika terdapat korelasi dengan tingkatan yang tinggi, maka dipastikan dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen mengalami gangguan. Pada pengujian ini diukur dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), maka dapat disimpulkan bahwa:

- Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,01$ maka tidak terjadi multikolinearitas.
- Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,01$ maka terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil model regresi yang sesuai dan benar jenisnya harus homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot* yaitu dilihat dari nilai prediksi variabel dependen (SRESID) dengan residual eror variabel bebas (ZPRED). Dasar pengambilan keputusan dilihat dari:

- Jika pola seperti titik yang membentuk pola teratur (bergelombang lebar kemudian menyempit) maka terindikasi terjadi heteroskedastisitas.
- Jika pola tidak jelas yaitu titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi kondisi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi dan dapat muncul karena adanya observasi yang memiliki urutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Peneliti memilih menggunakan Uji Durbin Watson yang dapat mendeksi dengan akurat. Pengujian Durbin Watson yaitu uji yang digunakan untuk melihat terjadinya korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya beserta rumus $(t-1)$ yang terdiri dari pengujian adanya pengaruh satu variabel dengan variabel lain. Uji ini hanya dilakukan pada data *time series* atau runtut waktu, rinciannya adalah sebagai berikut:

- $0 < d < d_L$, maka keputusan ditolak dan terdapat autokorelasi positif.
- $d_L < d < d_U$, maka *no decision* dan tidak ada autokorelasi positif.
- $4 - d_L < d < 4$, maka keputusan ditolak dan ada autokorelasi negatif.
- $d_U < d < 4 - d_U$, maka keputusan tidak ditolak dan ada korelasi positif maupun negatif.

c. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan belanja daerah dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi. Rincian dari hubungan variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X_1 = Pajak Daerah
- X_2 = Belanja Daerah
- E = Standart Error

d. Uji Hipotesis

Peneliti menggunakan Uji F simultan yang bertujuan untuk mengukur pengaruh bersama-sama variabel independen (pajak daerah dan belanja daerah) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Hal tersebut dilihat dari bagan anova dengan ketentuan sebagai berikut:

- o Jika nilai $F < 0,05$ maka Hipotesis 0 ditolak dan Hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti adanya pajak daerah dan belanja daerah bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- o Jika nilai $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya pajak daerah dan belanja daerah bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Rumus pada uji pengaruh simultan (Uji F) adalah sebagai berikut:

$$\text{Uji F} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

- R^2 = koefisien regresi
- k = jumlah variabel
- n = jumlah sampel

e. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Dalam rangka menguji hipotesis berpengaruh secara parsial atau tidak, dilakukan proses hitung seperti dibawah ini:

Rumus uji (t) pengaruh parsial:

$$t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Keterangan :

$H_a : \beta_n$

$H_o : S\beta_n$

Berdasarkan nilai signifikansi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dugaan tidak mempengaruhi ditolak dan dugaan yang mempengaruhi diterima. Hal ini bahwa terdapat pengaruh parsial variabel pajak daerah dan belanja daerah terhadap variabel dependen dari pertumbuhan ekonomi.
- Jika nilai signifikansi lebih kecil probabilitas 0,05, maka dugaan tidak mempengaruhi diterima dan dugaan mempengaruhi ditolak yaitu tidak ada pengaruh parsial variabel dari pajak daerah dan belanja daerah terhadap variabel dependen dari pertumbuhan ekonomi (Afdal, 2018; Alice *et al.*, 2021).

4. Hasil dan Pembahasan

Pajak Daerah Kota Malang dalam perkembangannya rata-rata pada tahun 2010-2020 menghasilkan nilai pajak daerah sebesar Rp 288.553.799.582 dengan persentase 21% setiap tahunnya. Nilai terbesar pada tahun 2019 sebesar Rp 460.047.450.664 sedangkan pada tahun 2010 memiliki nilai terendah sebesar Rp.60.151.082.871. Sedangkan belanja daerahnya terdiri dari belanja modal dan belanja operasi selama rentang waktu tahun 2010-2020. Rata-rata perkembangan Belanja Daerah Kota Malang tahun 2010-2020 sebesar Rp 1.317.097.126.714 dengan persentase 9% setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 nilai Belanja Daerah sebesar Rp 1.908.417.931.254 sedangkan tahun 2018 memiliki nilai terendah sebesar Rp 926.111.542.297. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2010-2022 rata-rata

sebesar 5,156% serta perkembangannya sebesar 0,33% setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,32%. Sedangkan pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonominya merupakan yang terendah dengan nilai negatif 2,26%. Secara umum Kota Malang merupakan daerah yang sektor ekonominya berbasis dari sektor hotel, restoran, serta perdagangan (Aisyah *et al.*, 2021). Rincian dari hasil pengujian adalah sebagai berikut:

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

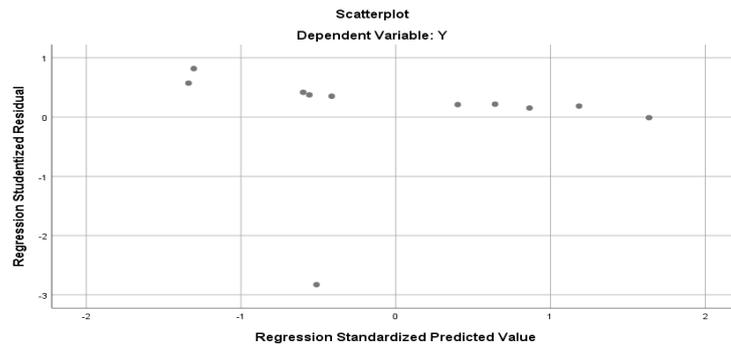
Hasil analisis yang didapatkan menunjukkan dua model Kolmogorov-Smirnova dan Shapiro-Wilk. Namun peneliti mengambil Shapiro Wilk karena sampel kurang dari 30. Berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel X1 (pajak daerah) nilai signifikasinya $0,120 > 0,05$, maka variabel X1 nilai residual berdistribusi normal. Pada variabel X2 (belanja daerah) nilai signifikasinya $0,503 > 0,05$ maka variabel X2 memiliki nilai residual berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dilihat dari nilai VIF pada variabel X1 (pajak daerah) dan X2 (belanja daerah) yaitu $1,008 < 10$ maka dinyatakan tidak memiliki multikolinearitas. Serta X1 (pajak daerah) dan X2 (belanja daerah) dengan nilai tolerance $0,992 > 0,01$ yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode scatterplot, yang memplot nilai prediktif atau disebut juga nilai ZPRED dengan nilai yang disebut juga nilai SRESID sebagai berikut:

Gambar 01. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Tahun 2022 (Diolah)

Gambar 01 menunjukkan titik-titik yang menggambarkan tidak membentuk pola secara jelas, dan menyebar di atas. Serta hasil titik-titik di atas tidak ada yang di bawah nilai 0 yang terlihat pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan hasilnya tidak terbentuk permasalahan heteroskedastitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji ini menggunakan model Durbin Watson dengan syarat pengujian yaitu apabila Durbin Watson (DW) bernilai $du - (4-dU)$. Hasil analisis : $dL < d < du$ $0,7580 < 1,131 < 1,6044$, jadi tidak ada autokorelasi positif yang berarti keputusan dari hasil uji tersebut tidak ada autokorelasi positif. Artinya tidak ada autokorelasi positif yaitu pada penelitian ini tidak mengalami gangguan karena tidak adanya autokorelasi pada nilai residual atau salah prediksi pada analisis regresi.

b. Uji Hipotesis

1) Uji F Simultan

Uji ini merupakan pengujian hipotesis untuk mengukur apakah ada pengaruh pajak daerah dan belanja daerah atau tidak secara simultan (bersama sama) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 df1 &= k-1 \\
 &= 3-1 \\
 &= 2 \\
 df2 &= n-k \\
 &= 11 - 3 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

Tabel 01. Uji F Simultan

Variabel bebas	Variabel terikat	f hitung	Sig.
X1	Y	12,906	0,003
X2			

Sumber : Data Primer Tahun 2022 (Diolah)

Maka dari itu f tabel pada penelitian ini sebesar =4,737. Dari Hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,906 dengan tingkat signifikan sebesar 0,003. tersebut menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12,906 > 4,737$) dan signifikan $0,003 < 0,05$. disimpulkan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Yang berarti bahwa variabel X1 Pajak Daerah dan X2 Belanja Daerah berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama sama terhadap variabel Y.

2) Uji t Parsial

Uji Parsial atau uji t digunakan uji hipotesis untuk mengukur apakah ada pengaruh atau tidak variabel independen (pajak daerah dan belanja daerah) secara parsial terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 02. Hasil Uji t Parsial

Variabel Bebas	t hitung	t tabel	Sig
(X1)	-5,016	1,860	0,001
(X2)	0,374	1,860	0,718

Sumber : Data Primer Yang Diolah tahun 2022

Hasil Uji t parsial yaitu:

o Variabel X1 Pajak Daerah

Hasil analisis regresi menghasilkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel yaitu nilai $t_{hitung} = -5,016$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,860$ maka menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka hal ini menunjukkan nilai signifikansi $<$ probabilitas yaitu $0,001 < 0,05$. Dari kedua hal tersebut terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan namun pengaruhnya negatif pada variabel X1 pajak

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2020.

o Variabel X2 Belanja Daerah

Hasil analisis regresi menghasilkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel yaitu nilai $t_{hitung} = 0,374$ sedangkan nilai $t_{tabel} = 1,860$ maka menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Nilai signifikansi yaitu 0,903 dan nilai probabilitas 0,05, maka menunjukkan nilai signifikansi $<$ probabilitas yaitu $0,718 > 0,05$. Kedua hal tersebut berarti terdapat pengaruh positif secara parsial tetapi tidak signifikan pada variabel X2 belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2010-2020.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Konstanta (α) menunjukkan positif 0,249 yang berarti nilai variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang) sebesar 0,249 atau 24,9 % jika tidak dipengaruhi oleh variabel X1 (Pajak Daerah) dan X2 (Belanja Daerah).

Tabel 03. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien
Konstanta	Y	0,249
X1	Y	-2,799
X2	Y	0,087

Sumber : Data Primer Yang Diolah tahun 2022

$$Y = 0,249 - 2,779 X_1 + 0,087 X_2 \dots \dots \dots (1)$$

Rincian hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada koefisien regresi X1 (pajak daerah) menunjukkan nilai negatif 2,799. Hal ini menunjukkan jika variabel X1 pajak daerah mengalami penurunan satu satuan, maka variabel Y (pertumbuhan ekonomi di Kota Malang) mengalami penurunan 2,799 atau sebesar 279,9%.
- 2) Koefisien Regresi X2 (belanja daerah) menunjukkan variabel X2 (belanja daerah) mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel Y (pertumbuhan ekonomi di Kota Malang) akan mengalami kenaikan 0,087 atau sebesar 8,7%.

- 3) Koefisien korelasi R sebesar 0,874 atau 87,4% yaitu menunjukkan secara bersama sama variabel X1 (pajak daerah) dan X2 (belanja daerah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara linear pajak dan belanja daerah di Kota Malang berjalan efektif sehingga mampu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.
- 4) Pada nilai Koefisien determinasi menunjukkan R square sebesar 0,763. Pada angka tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 (pajak daerah) dan X2 (belanja daerah) memberikan kontribusi terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi) di Kota Malang sebesar 76,3% dan sisanya 23,7% disebabkan oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian ini.

5. Penutup

Dari hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2010-2020 tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6,32%, sedangkan terendah pada tahun 2020 bernilai negatif minus -2,26%. Namun dilihat dari perkembangannya pada tahun 2019 mengalami penurunan tertinggi yang ditunjukkan oleh nilai negatif -0,04. Selain itu pada perkembangan tertinggi tahun 2011 mengalami kenaikan yang ditunjukkan nilai positif 3,54. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2010-2020 setiap tahunnya dengan nilai 5,156% dan rata-rata perkembangannya naik sebesar 0,33% setiap tahunnya. Temuan utamanya bahwa terdapat pengaruh negatif pajak daerah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang 2010-2020.

Daftar Pustaka

- Afdal, F. 2018. Pengaruh Investasi Asing Langsung, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto pada 33 Provinsi di Seluruh Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Aisyah, S., Utami, W. D., & Intan, P. K. 2021. *Di Kota Malang Menggunakan Metode Analisis Overlay*, Vol. 02, No. 02, pp. 105-115.
- Alice, E, Sepriani, L., & Yohana J.H. 2021. Pengaruh Investasi Penanaman

- Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, Vol. 20, No. 2, pp. 77-83. <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.77-83>
- Berkat, V. M., & Lumentah, N. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, Vol. 2, No. 1, pp. 50-67. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v2i1.211>
- Betanika N. N, & Sartika, S. H. 2020. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, Vol. 7, No. 02, pp. 197-202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1630>
- Nugroho, R. E. 2014. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 - 2014. *Pasti*, Vol. X, No. 2, pp. 177-191.
- Palguno, M. D., Valeriani, D., & Suhartono, S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Sorot*, Vol. 15, No. 2, pp. 105. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.2.105-116>
- Puspitasari, E., Purnama, S., Badriah, E., & Risna, K. 2019. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? *JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, pp. 37-48.
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Oktaviani, R. 2021. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama*, 11(April), pp. 55-64. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/667/542>
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. 2021. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 1, pp. 68. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3269>
- Safitri, I. I. 2021. Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 18, No. 01, pp. 76-83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Saraswati, I. A., & Ramantha, I. W. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan

- Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 24, pp. 662. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p25>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. 2021. *Prosiding Biema Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. Vol. 2, pp. 51-64.
- Sunarto dan Y Sunyoto. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, Vol. 43, pp. 1-10.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. 2021. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, Vol. 15, No. 2, pp. 164-179.